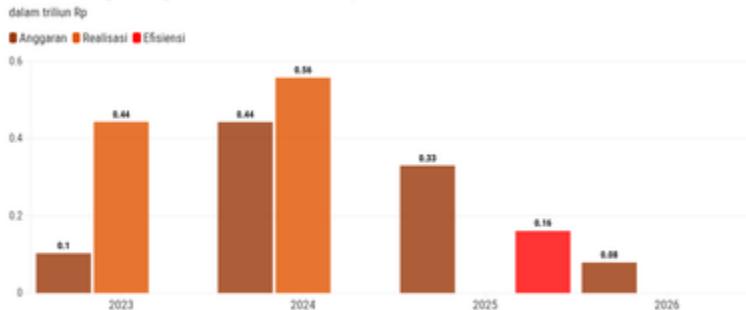


Overview Pagu Indikatif BADAN PANGAN NASIONAL

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

**) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

PAGU INDIKATIF 2026

Rp79,40 miliar

APBN 2025

Rp329.96 miliar

EFISIENSI APBN 2025

Rp160.90 miliar

Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam miliar Rp

■ Budget ■ Realisasi

Program Dukungan Manajemen

2023	63.05
2024	114.86
2025	117.06
2026	79.4

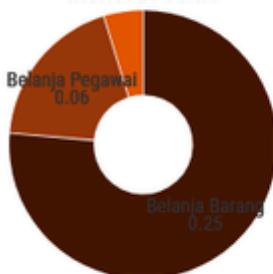
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

40.48	334.2
327.77	476.8
212.89	0

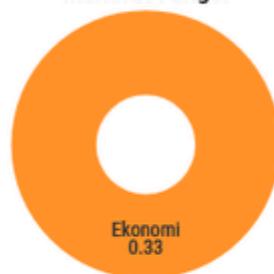
Profil Alokasi APBN 2024

dalam triliun Rp

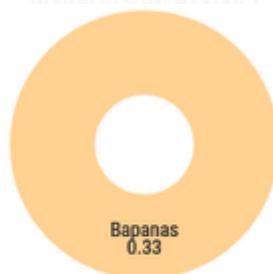
Menurut Jenis



Menurut Fungsi



Menurut Unit Eselon I



Menurut Sumber Dana



Menurut Program



Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024



Sumber: Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional 2022-2024, diolah

Highlights Overview Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- **Tahun 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp79,40 miliar** (24,06% dari alokasi 2025, Rp329,96 miliar). Penurunan alokasi ini didorong oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh Badan Pangan Nasional mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp160,90 miliar (48,76% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Bapanas dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja barang dengan distribusi rata-rata 78,68% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja pegawai 16,42%; dan belanja modal 4,90%.
- Menurut fungsinya, belanja Bapanas tahun 2024 seluruhnya digunakan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yaitu sebesar Rp329,96 miliar.
- Belanja Bapanas didistribusikan pada dua program yaitu
 - **Program Dukungan Manajemen**, rata-rata alokasi dalam 3 tahun terakhir sebesar 40,78% dari anggaran tahunan.
 - **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, rata-rata alokasi dalam 3 tahun terakhir sebesar 59,22%.
- **Program Dukungan Manajemen** dalam 2 (dua) tahun terakhir memiliki realisasi yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan anggaran awal, realisasi Bapanas tahun 2023 mencapai 172,88% namun, dibandingkan dengan anggaran setelah revisi mencapai 91%. Sedangkan untuk tahun 2024, realisasi terhadap anggaran awal sebesar 70%. Realisasi ini memiliki kegiatan utama yaitu dukungan manajemen dan teknis lainnya Bapanas.
- **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** memiliki realisasi yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Dibandingkan dengan pagu awal, realisasi anggaran mencapai 172,88% di tahun 2023 dan 145,47% di tahun 2024. Tingginya realisasi disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran terhadap Bapanas dalam rangka melaksanakan penyaluran CPP melalui bantuan pangan.
- Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja Bapanas tahun 2024 menunjukkan kondisi sebagai berikut:
 1. **Rasio ketersediaan komoditas pangan terhadap kebutuhan** tercatat sebesar **113,44%**, masih di bawah target **120%**. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya produksi dan realisasi impor pada beberapa komoditas. Meskipun demikian, tingkat ketersediaan tetap tergolong aman karena masih melebihi kebutuhan nasional.
 2. **Ketersediaan protein berdasarkan rasio Angka Kecukupan Protein (AKP)** mencapai **131,67%**, belum memenuhi target **140,74%**. Capaian ini menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani di masyarakat masih rendah dan kurang beragam, yang terutama disebabkan oleh keterbatasan daya beli. Bapanas perlu memperkuat strategi intervensi untuk mendorong konsumsi protein bergizi.
 3. **Angka Kecukupan Energi (AKE)** berhasil mencapai **139,17%**, melampaui target **129,21%**. Ini menandakan bahwa secara umum kebutuhan energi masyarakat telah terpenuhi sesuai standar Kementerian Kesehatan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian AKP, terlihat bahwa ketersediaan pangan lebih mencukupi dari sisi jumlah (energi) dibanding dari sisi kualitas (protein).

4. **Seluruh komoditas pangan yang menjadi kewenangan Bapanas** telah tercakup dalam sistem cadangan pangan nasional, dengan rasio capaian **100%**, sesuai target. Ini memperkuat kesiapan pemerintah dalam pengelolaan cadangan pangan melalui BUMN terkait.
5. **Rasio stabilitas harga di tingkat produsen** terhadap HAP/HPP masih **66,67%**, lebih rendah dari target **85%**. Ketidakstabilan harga ini mencerminkan tantangan dalam menjaga harga yang menguntungkan produsen. Bapanas bersama K/L lain perlu mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di sisi hulu.
6. **Stabilitas harga di tingkat konsumen** menunjukkan capaian **92,31%**, melampaui target **80%**, yang berarti harga pangan bagi masyarakat relatif terkendali sepanjang tahun. Meskipun begitu, adanya kesenjangan dengan harga produsen menandakan ketimpangan tata niaga yang perlu dibenahi.
7. **Jumlah provinsi dengan disparitas harga konsumen di bawah 10% dari rata-rata nasional** mencapai **27 provinsi**, sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan kestabilan harga antarwilayah relatif terjaga sepanjang tahun berjalan.
8. **Stabilitas harga antarwaktu** (per kuartal) di tingkat konsumen hanya tercapai **76,67%**, masih di bawah target **80%**. Artinya, masih terdapat fluktuasi harga antarperiode yang memerlukan penyesuaian kebijakan pasokan dan distribusi.
9. **Tingkat inflasi pangan bergejolak tahun 2024** sangat terkendali di angka **0,12%**, jauh di bawah batas atas target **4,0% ±1**, menunjukkan efektivitas stabilisasi harga pangan secara keseluruhan.
10. **Persentase kabupaten/kota yang tergolong rentan rawan pangan** tercatat sebesar **12,06%**, sedikit di atas target **12%**. Meskipun hanya berbeda tipis, hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi di wilayah-wilayah rawan.
11. **Prevalensi kekurangan konsumsi kalori (Prevalence of Undernourishment/PoU)** berada di level **8,27%**, masih jauh dari target **5%**. Ini menandakan adanya masalah ketahanan pangan kronis yang memerlukan pendekatan lintas sektor dari sembilan K/L terkait.
12. **Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu** tercapai sebesar **92,52%**, melebihi target **90%**. Ini mencerminkan efektivitas pengawasan pangan di sisi pre- dan post-market.
13. **Standarisasi lembaga keamanan dan mutu pangan di tingkat provinsi (OKKPD)** telah mencapai **79,41%**, melampaui target **70%**. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam pengawasan keamanan pangan.
14. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** sebagai indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat telah mencapai **98,21%**, melebihi target **95%**. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat mulai mengarah pada keragaman dan keseimbangan gizi yang lebih baik.

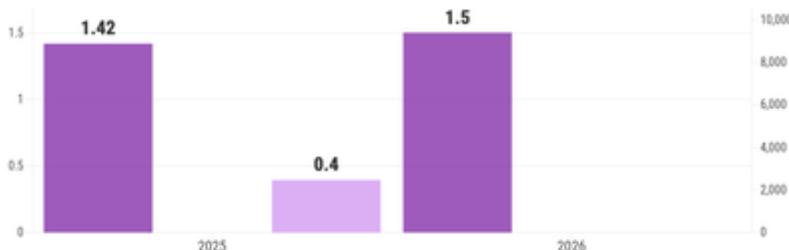
Pengelolaan anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan responsivitas yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program teknis, terutama dalam penyaluran bantuan pangan dan penguatan cadangan pangan nasional. Namun, penurunan tajam pagu indikatif tahun 2026 hingga hanya 24% dari tahun sebelumnya serta keterbatasan ruang belanja efektif akibat kebijakan efisiensi menuntut Bapanas untuk semakin selektif dan terfokus pada intervensi yang berdampak langsung. Kinerja substansial seperti kestabilan harga konsumen, pengendalian inflasi pangan, dan mutu pangan menunjukkan capaian positif, tetapi masih terdapat tantangan serius dalam hal kualitas konsumsi pangan (protein), ketimpangan harga di tingkat produsen, serta tingginya prevalensi *undernourishment* dan kerentanan rawan pangan. Untuk itu, Bapanas perlu memperkuat perencanaan berbasis prioritas, mengoptimalkan peran dalam stabilisasi harga di hulu, dan mendorong sinergi lintas sektor guna menjamin ketahanan dan gizi pangan nasional yang lebih berkelanjutan.

Overview Pagu Indikatif BADAN KARANTINA INDONESIA

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ Anggaran ■ Efisiensi



* Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

**) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

PAGU INDIKATIF 2026

Rp1.503,1 miliar

APBN 2025

Rp1.420,52 miliar

EFISIENSI APBN 2025

Rp395,88 miliar

Program Dukungan Manajemen

Tahun	Pagu Indikatif (triliun Rp)
2025	1,178.43
2026	1,038.50

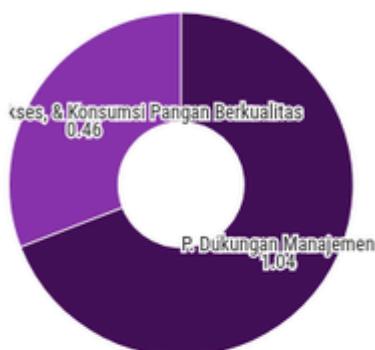
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Tahun	Pagu Indikatif (triliun Rp)
2025	242.08
2026	464.60

Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp

Menurut Program



Menurut Jenis



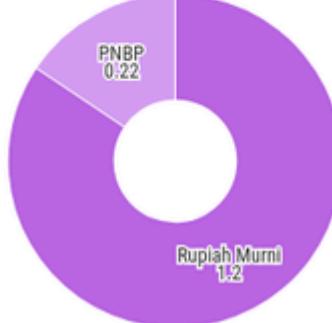
Menurut Fungsi



Menurut Unit Eselon I



Menurut Sumber Dana



Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target 2024	Keterangan	
Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	291	Tercapai	
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	334	Tercapai	
	Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensia hayati, jenis asing infasif, produk rekayasa genetik, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	24.83	30	Belum Tercapai
Terwujudnya kebijakan perkarantinaan yang efektif	Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan	109.55	100	Tercapai
Terwujudnya layanan perkarantinaan yang profesional	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	156.25		Tercapai
Meningkatnya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang partisipatif	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan	195		Tercapai
	Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan	69.97	75	Belum Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja Badan Karantina Indonesia 2024 diolah

Highlights Overview Pagu Indikatif Badan Karantina Indonesia 2026

oleh Marihot Nasution & Yunitha Romauli Nababan



- **Badan Karantina Indonesia (Barantin)** adalah lembaga pemerintah di bawah Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Barantin berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan, mengelola aset negara, serta melakukan pengawasan dan dukungan administratif serta substantif bagi seluruh unit di lingkungannya.
- Tahun 2026, Barantin memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp1.503,1 miliar (105,8% dari alokasi 2025, Rp1.420,52 miliar). Di tahun 2025, lembaga ini mengalami efisiensi anggaran yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Atas efisiensi tersebut, tahun 2025, nilai belanja yang dapat dimanfaatkan oleh Barantin hanya sebesar Rp395,88 miliar (hanya 27,9% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Barantin dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan distribusi 51,6% dari total anggaran tahun 2025; belanja barang 48,3%; dan belanja modal <1%.
- Menurut fungsinya, belanja Barantin tahun 2025 seluruhnya mendukung fungsi ekonomi dengan nilai Rp1.420,5 miliar.
- Distribusi belanja Barantin didominasi oleh program **Dukungan Manajemen** (83% dari total anggaran tahun 2025), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal. **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, sebagai core business Barantin, hanya menerima alokasi sebesar 17% dari total anggaran 2025.
- Di tahun 2026, **Program Dukungan Manajemen** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar (Rp1.178,43 miliar atau 78,40% dari total anggaran).
- **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** mengalami peningkatan alokasi di 2026, mencapai Rp464,6 miliar —menunjukkan realokasi anggaran atau penguatan fungsi utama Barantin.
- Sehubungan karena Barantin merupakan lembaga baru maka tren realisasinya belum terdapat datanya. Dengan kondisi anggaran tersebut, Barantin telah menyusun laporan kinerja sebagai titik awal pendirian lembaga dan penentuan *baseline* kinerjanya. Kinerja Barantin 2024 menunjukkan kondisi berikut:
 - Jumlah temuan HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina), HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti mencapai 291 kasus, melebihi target sebesar 280, yang menunjukkan bahwa Barantin memiliki kapasitas respons yang baik dalam menindaklanjuti temuan penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan di dalam negeri secara cepat dan tepat.
 - Jumlah temuan di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditindaklanjuti tercatat sebanyak 334 kasus, melampaui target 320 kasus, mencerminkan efektivitas sistem deteksi dan respon karantina di pintu-pintu masuk dan keluar negara, termasuk pelabuhan dan bandara.
 - Persentase tersedianya kebijakan karantina sesuai kebutuhan mencapai 109,55%, melampaui target 100%, yang menunjukkan bahwa Barantin mampu merumuskan dan menyediakan kebijakan teknis karantina secara adaptif, sesuai dinamika risiko dan kebutuhan nasional.

- Persentase pelaksanaan layanan karantina secara efektif dan efisien berada pada angka 156,25%, melebihi target 150%, yang mengindikasikan bahwa layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan telah dilaksanakan dengan mutu dan kecepatan yang sangat baik, sesuai standar pelayanan publik.
- Persentase penyelesaian kasus pelanggaran karantina mencapai 195%, melebihi target 180%, yang mencerminkan kemampuan Barantin dalam melakukan penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran karantina secara optimal dan responsif.
- Persentase tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian keamanan dan kelayakan produk biologis di pintu masuk atau keluar hanya mencapai 24,83% dari target 30%, menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap ancaman keamanan hidup dan pangan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, prosedur teknis, atau kompleksitas pengujian laboratorium.
- Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan sebesar 69,97%, belum mencapai target 75%, menandakan bahwa partisipasi publik dalam sistem karantina masih perlu ditingkatkan, terutama melalui strategi sosialisasi, edukasi, dan libatkan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan.

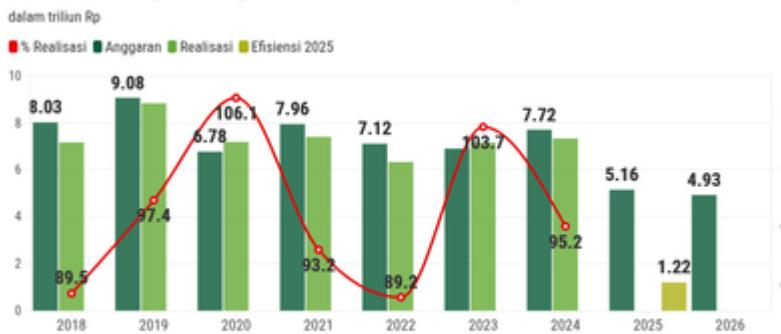
Sebagian target Barantin terlampaui secara signifikan – perlu peninjauan kembali penetapan target. Beberapa indikator seperti: Pelayanan karantina (156,25% dari target); Penyelesaian pelanggaran (195%); Penyediaan kebijakan (109,55%) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mungkin terlalu konservatif atau tidak mencerminkan kapasitas riil organisasi, sehingga kurang mendorong perbaikan kinerja secara progresif. Ini mengindikasikan perlunya:

- Penyesuaian metodologi penetapan target berbasis data historis dan kapasitas aktual
- Penyusunan target yang lebih ambisius namun realistik (*SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*)

Pengelolaan anggaran Barantin masih dalam tahap awal konsolidasi kelembagaan. **Meski menunjukkan kinerja teknis yang cukup menjanjikan di sejumlah aspek, struktur belanjanya masih sangat administratif dan belum cukup reflektif terhadap prioritas strategis lembaga.** Penyesuaian dalam proporsi anggaran, sistem penetapan target, dan penguatan kapasitas implementasi teknis perlu segera dilakukan agar Barantin dapat berperan optimal sebagai garda depan sistem biosecuriti nasional.

Overview Pagu Indikatif KEMENTERIAN KEHUTANAN

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

**) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

■ Budget ■ Realisasi

Program Dukungan Manajemen	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Program Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
	Budget	Realisasi	Budget	Realisasi	Budget	Realisasi
2022	3.38	3.08	0.17	0.17	0.81	0.59
2023	3.32	3.37	0.19	0.21	0.88	0.95
2024	3.64	3.46	0.17	0.15	1.2	1.03
2025	3.51	-	-	-	0.19	0.17
2026	3.57	-	-	-	0.11	-

Profil Alokasi APBN 2024

dalam triliun Rp



PAGU INDIKATIF 2026

Rp4.933,30 miliar

APBN 2025

Rp5.158,51 miliar

EFISIENSI APBN 2025

Rp1.216,99 miliar

Kementerian Kehutanan merupakan pecahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan tahun 2025 di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baseline Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025 - Capaian Kinerja 2024

■ Capaian 2023 ■ Capaian 2024 ■ Target 2024

Indikator Kinerja	Tren Capaian Kinerja	Capaian 2024 vs Target 2024			Target 2025
Penurunan laju deforestasi (juta ha/tahun)		0.31			0,20
Produksi kayu bulat (juta m3)		59.69	60	60	57,40
Produksi hasil hutan bukan kayu (kumulatif ribu ton)		3123	3573		2.500,00
Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional (triliun Rp)		143.4	145.1	137.2	162,10
Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting (miliar USD)		13.29	16	16	16,00
Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional KLHK (triliun Rp)		6.28	7.5	7.48	7,06
Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) - (kumulatif juta ha)		2.91	3.1	3	3,10
Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (kumulatif juta ha)		6.47	7.1	6.69	7,11
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)		18025	17500		3.800,00
Luas kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan (ribu ha)		1161.2		1137.98	196,00

Sumber: Renstra KLHK 2020-2024; Laporan Kinerja KLHK 2022, diolah

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Kehutanan 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- **Kementerian Kehutanan (Kemenhut)** merupakan lembaga hasil pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemisahan ini dimulai sejak dimulainya pemerintahan Prabowo-Gibran di 2025 lalu. **Kemenhut** bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Perannya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta penguatan industri hasil hutan. Selain itu, kementerian ini juga melakukan supervisi teknis, koordinasi internal, pengelolaan aset, pengawasan, penyuluhan, pengembangan SDM, dan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Presiden.
- Tahun 2026, Kemenhut memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp4.933,38 miliar (95,6% dari alokasi 2025, Rp5.158,51 miliar). Penurunan alokasi ini didorong oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh Kemenhut mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp1.216,99 miliar (hanya 23,6% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Kemenhut dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan porsi 43,7% dari total anggaran 2025; belanja barang 55,2%; dan belanja modal 1,1%.
- Menurut fungsinya, belanja Kemenhut tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp4.158,74 miliar (80,6%). Selain itu, Kemenhut juga menjalankan fungsi lainnya yaitu, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp923,77 miliar (17,9%) dan fungsi pendidikan Rp76 miliar (1,5%).
- Distribusi belanja Kemenhut sangat terkonsentrasi pada dua program utama:
 - **Dukungan Manajemen** (sekitar 68% dari total anggaran tahunan), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal.
 - **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, sebagai core business Kemenhut, memperoleh alokasi sekitar 29,8% dari total anggaran 2025 sebelum efisiensi.

Terdapat satu lagi program yang dijalankan Kemenhut, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, yang hanya mendapat alokasi 2,2% dari alokasi anggaran 2025.

- Tahun 2026 (berdasarkan pagu indikatif awal), **Program Dukungan Manajemen** memperoleh kenaikan alokasi menjadi Rp3.574,4 miliar dari Rp3.507,9 miliar di 2025, **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** justru mengalami penurunan mencapai Rp1.272,6 dari Rp1.537,68 di 2025.
- Dengan distribusi anggaran tersebut, kinerja Kemenhut dimulai dengan *baseline* 2024 sebagai berikut:
 - Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 mencapai 125.664.549,85 ha, luasan tersebut jika dibagi menurut fungsinya terdiri atas:
 1. Kawasan konservasi perairan mencapai 5.321.321 ha
 2. Kawasan konservasi darat mencapai 22.090.903,76 ha
 3. Hutan lindung mencapai 29.520.962,98 ha
 4. Hutan produksi terbatas mencapai 26.798.799,89 ha
 5. Hutan produksi mencapai 29.171.184,19 ha
 6. Hutan produksi yang Dapat Dikonversi mencapai 12.761.378,03 ha.

Di tahun 2024, luas kawasan hutan daratan dan perairan mencapai 125.541.298,80 ha.

- Penurunan laju deforestasi berhasil ditekan hingga mencapai 0,2 juta hektare per tahun, lebih rendah dari target sebesar 0,31 juta hektare, yang mencerminkan efektivitas pengendalian konversi hutan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga tutupan hutan di tengah tekanan ekspansi lahan, dan target 2025 yang tetap sebesar 0,2 juta ha mengindikasikan pendekatan yang realistik untuk mempertahankan capaian tersebut.
- Produksi kayu bulat mencapai 60 juta meter kubik, melampaui target sebesar 57,4 juta m³, menunjukkan bahwa produktivitas hutan produksi cukup tinggi dan stabil. Target 2025 tidak berubah, menandakan bahwa capaian saat ini dianggap sebagai batas produksi berkelanjutan yang masih memperhatikan prinsip kelestarian.
- Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) melonjak hingga 3.573 ribu ton, jauh melampaui target 2.500 ribu ton, menandakan bahwa subsektor HHBK berkontribusi signifikan dan menjadi potensi unggulan kehutanan. Namun, penurunan target 2025 ke 2.000 ribu ton terlihat tidak selaras dengan tren capaian positif, sehingga perencanaan target perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan potensi sektor ini.
- Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting tercapai sebesar 16 miliar USD, sesuai target, namun tidak menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan stagnasi ekspor kehutanan, kemungkinan dipengaruhi kondisi pasar global. Target 2025 yang tetap menunjukkan pendekatan konservatif dan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kehutanan mencapai Rp7,5 triliun, melebihi target Rp7,06 triliun, menunjukkan peningkatan kontribusi fiskal sektor kehutanan. Target 2025 hanya sedikit dinaikkan menjadi Rp7,48 triliun, memberi ruang pertumbuhan namun tetap berhati-hati terhadap fluktuasi produksi dan pasar.
- Luas kawasan hutan yang dilepas untuk program TORA mencapai 3,1 juta hektare, sedikit melampaui target 3 juta hektare, yang menandakan komitmen terhadap agenda reforma agraria berjalan sesuai rencana. Target 2025 dipertahankan pada angka yang sama, mengindikasikan kelanjutan kebijakan redistribusi lahan.
- Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat tercapai sebesar 7,1 juta hektare, melebihi target 6,69 juta hektare, menandakan bahwa program perhutanan sosial menunjukkan penguatan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Target 2025 dinaikkan ke 7,11 juta hektare, sejalan dengan tren positif tersebut.
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercatat sebesar 18.025 hektare, melebihi target 17.500 hektare, namun menunjukkan tren perlambatan dari tahun sebelumnya. Target 2025 justru diturunkan secara signifikan ke 3.800 hektare, kemungkinan mencerminkan refokus strategi, keterbatasan anggaran, atau perubahan pendekatan rehabilitasi.
- Luas kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan pada 2024 mencapai 1.137,98 ribu hektare, lebih rendah dari target 1.196 ribu hektare. Dalam konteks ini, penurunan merupakan hal positif karena menunjukkan pengurangan kejadian kebakaran atau peningkatan efektivitas pencegahan. Target 2025 ditetapkan jauh lebih rendah (196 ribu ha), yang menandakan peningkatan ekspektasi terhadap kontrol dini dan sistem peringatan dini kebakaran.
- Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional mencapai Rp145,1 triliun, melebihi target Rp137,2 triliun, mencerminkan bahwa sektor kehutanan masih memiliki kekuatan ekonomi signifikan. Peningkatan target 2025 menjadi Rp162,1 triliun menunjukkan adanya optimisme terhadap ekspansi sektor ini, termasuk potensi kontribusi dari ekowisata, jasa lingkungan, dan hasil hutan bernilai tambah.

- Tren kinerja secara umum meningkat dan stabil sejak 2023 → menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelaksanaan program dan koordinasi sektor kehutanan. Sebagian besar capaian KLHK 2024 melampaui target menunjukkan bahwa banyak target terlalu konservatif. Ini bisa berarti baseline belum memperhitungkan kapasitas aktual atau potensi sektor kehutanan.
- Beberapa target 2025 malah diturunkan, meski capaian 2024 sangat baik (misalnya HHBK dan rehabilitasi lahan), yang menimbulkan pertanyaan konsistensi antara capaian, potensi, dan perencanaan ke depan.

Pengelolaan anggaran Kemenhut **belum sepenuhnya mencerminkan orientasi kinerja**. **Sebagian besar anggaran masih didominasi belanja dukungan manajemen (68%)**, sementara alokasi untuk program inti pengelolaan hutan justru menurun di 2026. Efisiensi fiskal yang membatasi ruang belanja riil (hanya 23,6% di 2025) menuntut selektivitas tinggi dalam pemanfaatan anggaran.

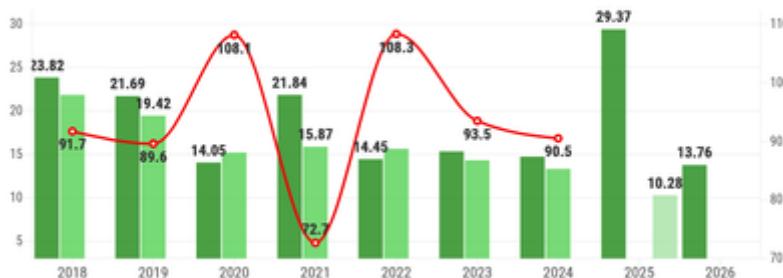
Padahal, kinerja sektor kehutanan tahun 2024 menunjukkan capaian yang melampaui target pada sebagian besar indikator utama, **namun tidak selalu direspon secara progresif dalam penetapan target 2025**, mencerminkan ketidaksinkronan antara hasil dan perencanaan.

Untuk memastikan efektivitas, **alokasi anggaran perlu lebih diarahkan pada program berdampak langsung**, seperti rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan peningkatan PNBP, yang terbukti memiliki leverage tinggi terhadap kinerja nasional kehutanan.

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ % Realisasi ■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi



*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

**) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

PAGU INDIKATIF 2026

Rp13.757,1 miliar

APBN 2025

Rp29.373,98 miliar

EFISIENSI APBN 2025

Rp10.282,96 miliar

Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

■ Budget ■ Realisasi

Program Dukungan Manajemen	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2021 5.59	12.4	2.18	1.02	0.65
2022 4.93	6.81	1.65	0.75	0.32
2023 4.52	8.32	1.82	0.66	
2024 4.47	8.2	1.42	0.64	
2025 3.41	23.22	2.2	0.55	
2026 2.54	10.45	0.76	0.01	

Distribusi Alokasi APBN 2024

dalam triliun Rp

Menurut Program



Menurut Jenis



Menurut Fungsi



Menurut Unit Eselon I



Menurut Sumber Dana



Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024

█ Capaian 2024 █ Target 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian 2024 vs Target 2024	Keterangan
PN 1. PP 3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri (%)		1.38 █ 1.33 █	Tercapai
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%)		92.53 █ 91.94 █	Tercapai
	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (%)		92.37 █ 89.87 █	Tercapai
	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		80.62 █ 80.5 █	Tercapai
	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)		53.41 █ 54.47 █	Belum Tercapai █
	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (%)		96.68 █ 94.62 █	Tercapai
PN 1. PP 6. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian (%)		93.07 █ 91.19 █	Tercapai
	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional (%)		15.44 █ █	Tercapai
PN 1. PP 6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)		97.5 █ 90 █	Tercapai
	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (%)		22.06 █ 22 █	Tercapai
	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi		90.24 █ 90 █	Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian 2024, data diolah

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Pertanian 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

Infografis Interaktif



<https://tinyurl.com/ysjzze53>

- **Tahun 2026, Kementerian Pertanian memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp13.757,1 miliar** (46,8% dari alokasi 2025, Rp29.373,98 miliar). Penurunan alokasi ini didorong dan didasari oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh Kementerian Pertanian mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp10.282,96 miliar (hanya 35 % dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Kementerian Pertanian dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja barang dengan distribusi rata-rata 83,54% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja pegawai 12,96%; dan belanja modal 3,5%.
- Menurut fungsinya, belanja Kementerian Pertanian tahun 2024 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp28,99 miliar (98,7 %) sisanya fungsi pendidikan Rp374,97 juta (1,3%).
- Distribusi belanja Kementerian Pertanian terkonsentrasi pada dua program yaitu:
 - **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** (rata-rata 61,48% dari total anggaran tahunan)
 - **Dukungan Manajemen** (rata-rata 24,93% dari total anggaran tahunan)Sementara itu, **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dan **Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** mendapat alokasi yang cukup kecil yakni dibawah 10%. Adapun Program Riset dan teknologi tidak lagi dianggarkan sejak tahun 2023 karena berpindahnya fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar yakni 47-79% hingga tahun 2025 dengan realisasi rata-rata tahun 2021-2023 sebesar 93,22%. Untuk tahun 2025, terjadi lonjakan alokasi anggaran pada Kementerian Pertanian hingga 99% dibanding anggaran tahun 2024. Atas peningkatan tersebut, alokasi untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mencapai Rp23,215 miliar (79,04% dari anggaran tahun 2025). Peningkatan tersebut bertujuan untuk mendukung kebijakan strategis tahun 2025 antara lain: (1) Peningkatan produktivitas dan cetak sawah; (2) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan; (3) Pengembangan pangan lokal dan bioforkasi; (4) Satu data pangan dan tata kelola pangan; (5) Keterlusuran (*raceability*); dan (6) *biosecurity*. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah berfokus pada penguatan fungsi utamanya.
- **Program Dukungan Manajemen** menunjukkan tren penurunan jumlah anggaran dari tahun 2021 hingga 2025 dengan realisasi rata-rata tahun 2021-2023 sebesar 89,56%.
- **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** mendapat alokasi anggaran rata-rata sekitar 9% dari total anggaran tahunan dengan rata-rata realisasi tahun 2021-2023 sebesar 87,37%
- **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** mendapat alokasi anggaran yang paling kecil yaitu rata-rata 3,42% dari anggaran tahunan hingga tahun 2025 dengan rata-rata realisasi tahun 2021-2023 sebesar 110,04%.

- Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja Kementerian tahun 2024 menunjukkan prestasi sebagai berikut:

1. **Ketersediaan pangan strategis dalam negeri** mengalami peningkatan sebesar **1,38%**, yang berarti telah **melampaui target 1,33%**. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya produksi komoditas hortikultura dan peternakan.
2. **Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi standar keamanan pangan** mencapai **92,53%**, melebihi target yang ditetapkan sebesar **91,94%**. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Pertanian dalam menjaga mutu dan keamanan pangan hewani.
3. **Penanganan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim** berhasil dilaksanakan sebesar **92,22%**, yang melampaui target **89,87%**. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pengendalian OPT serta peningkatan kapasitas teknis di lapangan.
4. **Wilayah yang berhasil dikendalikan dari penyakit hewan menular strategis** tercatat sebesar **80,62%**, sedikit di atas target **80,5%**. Ini menandakan kinerja yang baik dalam mengurangi risiko penyakit hewan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun keresahan masyarakat.
5. **Tingkat pemenuhan prasarana pertanian** hanya mencapai **53,41%**, masih berada di bawah target sebesar **54,47%**. Kesenjangan ini sebagian disebabkan oleh perubahan kebijakan dan *refocusing* anggaran ke kegiatan lain.
6. **Pemanfaatan sarana produksi pertanian** tercapai sebesar **96,68%**, melebihi target **94,62%**. Capaian ini ditopang oleh peningkatan penggunaan fasilitas sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, serta dukungan pada subsektor hortikultura dan peternakan.
7. **Sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian** telah dimanfaatkan sebesar **93,07%**, yang melampaui target **91,19%**. Ini menunjukkan dorongan kuat terhadap pengembangan infrastruktur pascapanen yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani.
8. **Nilai ekspor produk pertanian nasional** tumbuh sebesar **15,44%**, jauh melampaui target pertumbuhan **6,53%**. Pertumbuhan ini didorong oleh komoditas unggulan seperti perkebunan dan hortikultura, meskipun komoditas pangan dan peternakan masih mengalami penurunan ekspor.
9. **SDM pertanian yang mengalami peningkatan kapasitas** tercatat sebesar **97,50%**, melebihi target **90%**. Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang menjangkau pelaku pertanian secara luas.
10. **Kelembagaan petani yang telah menerapkan teknologi** mencapai **22,06%**, sedikit melampaui target **22%**. Pencapaian ini diperoleh melalui penguatan kegiatan pengawalan dan pendampingan, khususnya melalui program korporatisasi petani yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan Pertanian.

Berdasarkan informasi alokasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa **Kementerian Pertanian (Kementan) mampu menjaga kinerja yang cukup solid meskipun menghadapi tekanan efisiensi anggaran**. Penurunan drastis pagu tahun 2026 menjadi Rp13,76 triliun (hanya 46,8% dari alokasi 2025) sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres No. 1/2025. Meskipun demikian, sebagian besar indikator kinerja strategis—seperti peningkatan ketersediaan pangan, keamanan pangan hewani, pengendalian OPT dan penyakit hewan, serta ekspor produk pertanian—berhasil melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa **alokasi anggaran yang fokus pada program utama, terutama "Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas", mampu menghasilkan output yang relevan dan berdampak nyata**, apalagi program ini secara konsisten mendapatkan porsi anggaran terbesar.

Namun demikian, terdapat beberapa **cataatan penting**. Salah satunya adalah masih rendahnya capaian prasarana pertanian, yang kemungkinan besar terdampak oleh *refocusing* anggaran dan perubahan kebijakan. Selain itu, realisasi tinggi tidak selalu menjangkau semua program secara merata, seperti program pendidikan vokasi dan peningkatan daya saing industri pertanian yang hanya memperoleh porsi kecil dari anggaran.

Adapun penggunaan **indeks komposit dalam pengukuran kinerja Kementerian**, seperti pada indikator ketersediaan pangan strategis, memiliki dua sisi. Di satu sisi, **indeks ini membantu menyederhanakan pengukuran dan menciptakan indikator makro yang komunikatif**. Namun di sisi lain, **penggabungan berbagai komoditas ke dalam satu skor dapat menyembunyikan kegagalan atau kemunduran pada subsektor tertentu**, seperti kedelai atau peternakan, yang justru memerlukan perhatian khusus. Hal ini berisiko menurunkan presisi dalam penentuan arah kebijakan dan pengalokasian sumber daya.

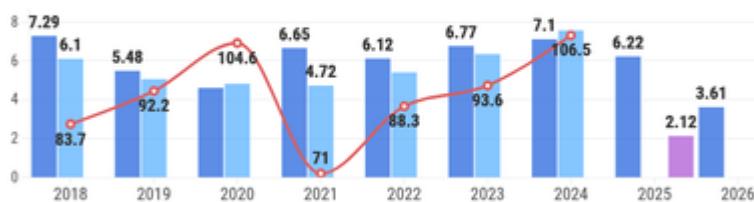
Refleksi ke depan: Kementerian perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih terdistribusi dan komponen-spesifik, agar capaian program dapat diukur secara adil dan mendalam. Optimalisasi belanja tetap harus diarahkan pada program teknis yang terbukti produktif, namun juga memperkuat sistem pendukung seperti riset, pelatihan vokasi, dan kelembagaan petani, guna menjamin keberlanjutan dan daya saing sektor pertanian jangka panjang.

Overview Pagu Indikatif KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ % Realisasi ■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi



*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

**) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

PAGU INDIKATIF 2026

Rp3.606,80 miliar

APBN 2025

Rp6.220,56 miliar

EFISIENSI APBN 2025

Rp2.120,36 miliar

Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

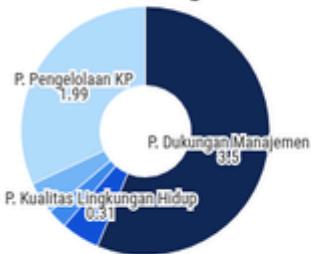
■ Budget ■ Realisasi

	Program Dukungan Manajemen	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2021	3.44 2.96	0.08 0.07	0.24 0.11	0.37 0.25	2.42 1.27	0.09 0.06
2022	3.41 3.19	0.08 0.07	0.17 0.12	0.27 0.27	2.15 1.74	0.03
2023	3.69 3.53	0.09 0.08	0.18 0.16	0.33 0.3	2.47 2.27	
2024	3.87 3.63	0.11 0.1	0.19 0.18	0.37 0.37	2.57 3.28	
2025	3.5	0.31	0.16	0.26	1.99	
2026	2.55	0.05	0.05	0.09	0.87	

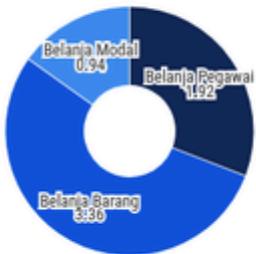
Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp

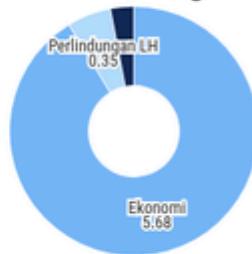
Menurut Program



Menurut Jenis



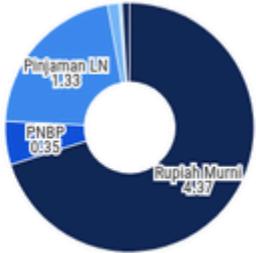
Menurut Fungsi



Menurut Unit Eselon I

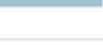


Menurut Sumber Dana



Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024 ■ Target 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target	Tren Capaian
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101.76 ■ 108	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102.07 ■ 105	
	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	104.94 ■ 104.75	
Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	129.62 ■ 101.75	
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	56.7 ■ 80 ■ 80	
	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	29.9 ■ 29.3	
Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)	5 ■ 5 ■ 6	
	Nilai ekspor hasil perikanan (miliar USD)	5.95 ■ 7.2 ■ 6.25	
	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58.91 ■ 59 ■ 75	
Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Percentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	75.35 ■ 72 ■ 75	
Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11 ■ 11	
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21 ■ 21	
	Produksi perikanan (juta ton)	24.57 ■ 30.85 ■ 24.58	
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam (juta ton)	2.04 ■ 2	
	Percentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	95.25 ■ 70 ■ 70	
	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan (triliun Rp)	8.28 ■ 10.73	
Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	Percentase pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	98.57 ■ 98	

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026

oleh Marihot Nasution & Yunitha Romauli Nababan

- Tahun 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp3.606,8 miliar (58,0% dari alokasi 2025, Rp6.220,6 miliar). Penurunan alokasi ini didorong oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh KKP mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp2.120,4 miliar (hanya 34,1% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja KKP dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan distribusi rata-rata 29,2% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja barang 58,0%; dan belanja modal 12,8%.
- Menurut fungsinya, belanja KKP tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp5.676,9 miliar (91,3%). Selain itu KKP juga menjalankan fungsi lainnya yaitu, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp354,9 miliar (5,7%) dan fungsi pendidikan Rp188,8 miliar (3%).
- Distribusi belanja KKP sangat terkonsentrasi pada dua program utama:
 - **Dukungan Manajemen** (sekitar 50%–60% dari total anggaran tahunan), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal.
 - **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**, sebagai *core business* KKP, mendominasi sisanya, terutama pasca 2023.

Sementara itu, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, **Program Nilai Tambah Industri**, dan **Program Riset** mendapat alokasi sangat kecil dan cenderung stagnan—menunjukkan bahwa **fungsi pengembangan SDM dan inovasi masih belum menjadi prioritas utama** dalam struktur anggaran KKP.

- **Program Dukungan Manajemen** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar (sekitar Rp3,4–3,9 triliun per tahun hingga 2025). Tingkat realisasi cukup tinggi dan stabil, berkisar 85%–95% tiap tahun.
- **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** mengalami **lonjakan realisasi pada 2024**, mencapai Rp3,28 triliun dari pagu Rp2,57 triliun—menunjukkan realokasi anggaran atau penguatan fungsi utama KKP.
- Program-program lainnya menunjukkan **realisasi yang rendah secara konsisten**, terutama: **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**, realisasi hanya 50% atau kurang dari pagu. **Program Kualitas Lingkungan Hidup**, sangat kecil baik dari segi alokasi maupun realisasi (\leq Rp0,1 triliun).
- Tahun 2026 (berdasarkan pagu indikatif awal), **Program Dukungan Manajemen** turun drastis menjadi Rp2,55 triliun, **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** juga turun ke Rp0,87 triliun
- **Program lain seperti kualitas lingkungan hidup, nilai tambah dan daya saing industri, Pendidikan dan vokasi** hanya mendapat alokasi $<$ Rp0,1 triliun. Hal ini disebabkan diberlakukannya efisiensi anggaran yang juga mewarnai penentuan alokasi anggaran 2026.
- Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja KKP menunjukkan prestasi sebagai berikut:
 - **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** pada tahun 2024 mencapai **101,76**, masih **belum memenuhi target** yang ditetapkan sebesar **108**, sehingga menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan nelayan masih perlu ditingkatkan.

- **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)** tercatat sebesar **102,07** pada tahun 2024, yang juga **belum mencapai target** tahunan sebesar **105**, menandakan bahwa kondisi ekonomi pembudidaya ikan masih belum optimal.
- **Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)** mencapai **104,94**, **melampaui target tahun 2024** yang sebesar **104,75**, yang menunjukkan bahwa sektor pengolahan hasil perikanan mengalami **kinerja yang sangat baik** dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di bidang ini.
- **Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)** mencatat capaian tertinggi sebesar **129,62**, jauh **melampaui target** tahun 2024 sebesar **101,75**, yang mencerminkan **peningkatan signifikan kesejahteraan petambak garam**, dan menjadi indikator dengan kinerja paling menonjol.
- **Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman** pada tahun 2024 hanya mencapai **56,7%**, jauh **di bawah target** sebesar **80%**, yang mengindikasikan **masih tingginya tekanan terhadap sumber daya ikan** dan lemahnya implementasi tata kelola perikanan berkelanjutan untuk mencegah overfishing.
- **Konsumsi ikan per kapita** pada tahun 2024 tercatat sebesar **58,91 kg/kapita/tahun**, **hampir mencapai target** 59 kg namun menunjukkan tren yang **stagnan**, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk **edukasi masyarakat dan promosi konsumsi ikan lokal**, terutama di wilayah dengan konsumsi rendah.
- **Luas kawasan konservasi perairan** telah mencapai **29,9 juta hektare**, **melewati target** tahun 2024 sebesar 29,3 juta hektare. Namun, pertumbuhannya relatif lambat dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan perlunya **percepatan dalam penambahan dan pengelolaan kawasan konservasi laut** yang efektif.
- **Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan** pada 2024 hanya sebesar **0,68%**, jauh **di bawah target** 5% (2024) maupun 6% (2025). Hal ini menunjukkan **kinerja ekonomi sektor perikanan yang melemah**, dan perlunya **peningkatan produktivitas, inovasi budidaya, serta diversifikasi pasar**.
- **Nilai ekspor hasil perikanan** tahun 2024 mencapai **5,95 miliar USD**, masih **di bawah target** sebesar **7,2 miliar USD**, yang mencerminkan **perlunya strategi ekspor yang lebih agresif**, peningkatan kualitas produk, dan penetrasi pasar global yang lebih luas.
- **Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)** yang **melaksanakan penangkapan ikan terukur** telah mencapai **11 wilayah**, **sesuai dengan target 2024**, menandakan bahwa kebijakan penangkapan terukur mulai diterapkan secara penuh, namun perlu evaluasi keberlanjutan dan kualitas implementasinya.
- **Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir** telah mencapai **21 kawasan**, yang berarti **seluruh target tahun 2024 berhasil tercapai**. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan hasil penataan tersebut ke dalam pelaksanaan program lintas sektor secara konkret.
- **Dana yang disalurkan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan** pada tahun 2024 baru mencapai **Rp8,28 triliun**, **masih jauh di bawah target** sebesar **Rp10,73 triliun**, yang menunjukkan adanya kemungkinan kendala dalam **mekanisme penyaluran, kesiapan pelaku usaha dalam mengakses bantuan, atau keterbatasan kapasitas pelaksana program**. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan tata kelola penyaluran dana.

Struktur anggaran KKP masih berfokus pada dukungan manajemen (60%), sementara program kesejahteraan, konservasi, pendidikan, dan riset menerima alokasi minim. Kinerja ekonomi sektor kelautan tetap lemah meski anggaran besar, menunjukkan pelaksanaan program yang belum efektif. Penurunan pagu indikatif 2026 sebesar 58% menuntut restrukturisasi program dan prioritisasi intervensi berbasis hasil untuk menjaga kinerja dengan sumber daya terbatas.